

Media Massa dan Institusi Politik¹

Media massa merupakan alat yang paling strategis untuk melakukan penyebaran nilai, pembentukan opini, serta memediasi berbagai pihak dalam melakukan komunikasi. Karena alasan tersebut, media sangat gampang dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang mengelilinginya, baik kepentingan publik, pemerintah, maupun institusi politik.

Institusi politik adalah tempat lahirnya ideologi-ideologi politik dan aktor-aktor politik yang kemudian ditempatkan dalam organisasi pemerintahan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Untuk dapat memahami institusi politik, kita dapat menggunakan tiga pendekatan institusionalisme, yaitu institusionalisme sosiologis, institusionalisme historis, dan institusionalisme politik².

Institusionalisme sosiologis memandang bahwa negara dan politisi membentuk perspektif budaya dalam organisasi dan politiknya sendiri. Dasar pendekatan institusionalisme sosiologis adalah teori budaya. Oleh karenanya, pendekatan ini fokus pada penyebaran ide dan bentuk-bentuk budaya, sebagaimana organisasi mencari legitimasi. Berbeda dengan institusionalisme sosiologis, institusionalisme historis mengacu pada catatan sejarah. Institusionalisme historis menempatkan analisis sejarah dan penelitian-penelitian lain dalam memahami fenomena institusinya. Sedangkan institusionalisme politik berusaha menunjukkan kekuatan yang jelas serta menekankan peran kausal institusi politik terhadap proses dan hasil politik³.

Secara singkat media memiliki dua peran⁴. Pertama, media dapat mempengaruhi kebijakan institusi. Kedua, media dapat dijadikan sebagai katalis atau penetral manakala terjadi konflik perubahan institusional. Hal ini menguatkan keyakinan bahwa media sangat berperan penting bagi institusi politik.

Baik institusi politik, pemerintah, maupun kekuatan kekuasaan lain pasti akan selalu memiliki kepentingan terhadap media massa. Hal ini tidak dapat dihindari, karena media adalah alat yang paling efektif untuk melakukan hegemoni dan mempengaruhi masyarakat. Padahal disisi lain, media massa harus dijaga independensinya sebagai salah satu pilar demokrasi.

¹ Bahan bacaan diambil dari buku Kevin L Teicht dan J. Craig Jenkins, "Handbook of Politics" dan buku Christopher J Coyne dan Peter T. Leeson, "Media, Development, and Institutional Change"

² Kevin T Leicht dan J. Craig Jenkins, 2010, "Handbook of Politics", Springer. Hal 22

³ Kevin T Leicht dan J. Craig Jenkins, 2010, "Handbook of Politics", Springer. Hal 39-40

⁴ Christopher J Coyne dan Peter T. Leeson, 2009, "Media, Development, and Institutional Change", UK: Edward Elgar Publishing. Hal 17

Pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah, jika memang media massa akan selalu dipengaruhi kepentingan, maka sejauh manakah intervensi pihak-pihak tertentu khususnya institusi politik dalam mempengaruhi industri media? Hingga saat ini hal tersebut masih menjadi perdebatan. Belum ada yang dapat memastikan dan mengukur intervensi institusi politik pada media. Yang pasti adalah, intervensi terbesar pasti akan media dapatkan dari pemiliknya. Sehingga dapat diprediksi bahwa jika pemiliknya merupakan bagian dari institusi politik, maka kepentingan institusi politik juga pasti akan mempengaruhi industri media yang dimilikinya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa media tidak dapat sepenuhnya independen. Meskipun media dituntut untuk bebas dari tekanan, mau tidak mau media akan selalu dipengaruhi oleh intervensi pihak-pihak lain, baik pemerintah, pemilik, maupun institusi politik tertentu.

Dalam kaitannya dengan institusi politik, media memiliki relasi yang kuat sebagai alat untuk menyebarkan ideologi-ideologi politis dan merangkul massa untuk mendapatkan kekuasaan. Sehingga tidak mengherankan banyak institusi politik yang berebutan menguasai media, karena menguasai media berarti menguasai masyarakat.

Selain untuk memenuhi kepentingan institusi politik, media massa juga berperan dalam perubahan dan pembangunan institusional. Untuk dapat melakukan perubahan institusional, diperlukan sebuah alat untuk mentransformasi informasi dan nilai-nilai kepada masyarakat. Media merupakan alat yang paling tepat. Karena disamping media memiliki kemampuan untuk mengumpulkan massa, media juga memiliki kemampuan untuk mentransformasi nilai-nilai sehingga kemudian dapat merubah persepsi dan opini publik⁵.

⁵ Christopher J Coyne dan Peter T. Leeson, 2009, "Media, Development, and Institutional Change", UK: Edward Elgar Publishing. Hal 16